

KESUNGGUHAN DALAM MELAKSANAKAN CITA-CITA “KEADILAN SOSIAL”

Oleh Nurcholish Madjid

Salah satu perkembangan positif yang terjadi di tanah air kita akhir-akhir ini ialah adanya kesadaran yang semakin besar dari para pemimpin kita tentang pentingnya melaksanakan keadilan sosial sebagai bagian daripada kegiatan pembangunan. Presiden sendiri menyatakan komitmennya kepada keadilan sosial itu dalam beberapa kali kesempatan, termasuk di depan para gubernur dari seluruh tanah air yang datang ke Jakarta untuk suatu konferensi.

Sebenarnya keinsafan akan rasa keadilan sosial ini harus sudah menjadi milik setiap warga negara, dan bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebab sebagai sila terakhir dalam Pancasila, keadilan sosial dinyatakan sebagai tujuan kita membentuk Republik Indonesia merdeka ini.

Agama-agama pun meletakkan cita-cita mewujudkan keadilan sosial itu sebagai salah satu ajaran pokoknya. Islam dikenal sebagai agama yang amat banyak berbicara tentang pembelaan terhadap kaum miskin serta tentang persamaan mutlak antara sesama manusia. Dan etika Kristen telah memberikan ilham bagi banyak pikiran tentang kemanusiaan di Dunia Barat. Begitu pula agama Hindu, ia telah melahirkan putra-putra kemanusiaan yang besar, di antaranya ialah bapak India Merdeka Mahatma Gandhi.

Apabila norma-norma itu telah dengan sendirinya kita terima dan setuju, maka tidak kurang pentingnya ialah bagaimana melaksanakannya dalam tindakan-tindakan konkret. Di sinilah orang

lebih sulit bersatu pikiran disebabkan beranekaragamnya tingkat pengalaman, penghayatan dan pengetahuan atau pandangan.

Seseorang yang tidak pernah mengalami sendiri suatu perlakuan tidak adil tentu kurang dapat merasakan dan menangkap segi-segi ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Kesemuanya itu mungkin tampak baginya sebagai sesuatu yang wajar saja. Demikian pula, mungkin seseorang mengalami suatu kezaliman, namun karena telah terbiasa kepada sikap “*nrimo*” maka ia tidak menghayati kezaliman tersebut, dan kepincangan sosial itu juga dilihatnya sebagai sesuatu yang sudah semestinya terjadi. Begitu juga pengetahuan dan pandangan yang dimiliki seseorang tentang makna keadilan akan banyak mewarnai sikapnya dalam segi pelaksanaan.

Tentang hal yang terakhir ini, kita ingin mengemukakan suatu perkara. Bagi seseorang yang secara sungguh-sungguh terikat (*committed*) kepada nasib rakyat, ia akan memperdalam pengetahuan dan memperluas pandangan tentang sejarah pikiran dan pelaksanaan keadilan sosial yang ada pada umat manusia. Tanpa hendak memperkecil arti sejarah bangsa sendiri dan pikiran-pikirannya yang orisinal dan nasional (kalaupun ada), adalah suatu sikap yang tidak realistis apabila kita merasa cukup sendiri dan tidak perlu belajar kepada bangsa-bangsa atau orang-orang lain. Keharusan zaman modern ialah adanya kesadaran akan interdependensi internasional.

Salah satu aspek keadilan sosial itu ialah pembagian kekayaan nasional yang lebih merata. Berabad-abad manusia memikirkan masalah ini, dan untuk itu telah ditulis berjilid-jilid buku yang tidak semua orang dapat memahaminya. Namun kesadaran yang ditimbulkannya telah hampir merata di seluruh dunia, yaitu bahwa kepincangan sosial yang terpenting ialah yang menyangkut distribusi rezeki. Idenya yang terpokok ialah bagaimana menghilangkan kemiskinan. Dan kemiskinan itu ada karena ada kekayaan: tidak ada orang miskin dalam suatu masyarakat jika di situ tidak terdapat orang kaya.

Kemiskinan tidaklah mengakibatkan ketidakbahagiaan. Banyak orang melarat yang dalam hidupnya ternyata lebih gembira dan bahagia daripada orang kaya. Tetapi kemiskinan mengakibatkan degradasi, sehingga membahayakan bagi suatu masyarakat. Kejahatan yang ditimbulkannya bersifat menular, dan tidak dapat dihindari hanya dengan pengasingan diri orang-orang kaya dalam bentuk apa pun yang mungkin.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, kita melihat sesuatu yang amat meminta perhatian dalam masyarakat kita. Ambillah pola-pola kehidupan di ibukota Jakarta sebagai “Miniatur Indonesia” yang belum adil ini. Kita saksikan setiap saat betapa orang-orang yang lebih beruntung dengan bebas menikmati kekayaannya, dan betapa orang-orang miskin juga dengan bebas memamerkan kemelaratannya. Orang-orang kaya itu seakan-akan berkata, “Semua harta benda ini adalah hasil keringatku sendiri, dan oleh karena itu adalah hak pribadiku yang mutlak untuk menikmatinya dengan cara-cara yang aku senang! Dan salah orang miskin sendirilah apabila ia tidak cakap mengumpulkan kekayaan!” Sebaliknya orang-orang miskin itu seakan-akan berkata (karena umumnya terdiri dari mereka yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali), “Sudah terlanjur aku menjadi melarat, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi!”

Padahal semua keadaan itu adalah semata-mata hasil dari suatu sistem, yaitu sistem distribusi rezeki yang berlaku. Dan mereka tidak menyadari bahwa suatu sistem dapat diubah sama sekali. Tidak ada suatu sistem yang mutlak berlaku dan benar selama-lamanya.

Menurut seorang ahli, ada tujuh sistem pembagian rezeki yang sekarang ini diperjuangkan orang atau dilaksanakan: (1) Kepada setiap orang diberikan apa yang dia hasilkan. (2) Kepada setiap orang diberikan menurut sepatutnya. (3) Kepada setiap orang diberikan atau memperoleh apa yang dia mampu merebutnya. (4) Kepada orang kebanyakan diberikan sekadar untuk menjaga agar mereka tetap hidup sepanjang hari, dan selebihnya diberikan kepada orang-orang terhormat. (5) Membagi masyarakat menjadi

berkelas-kelas; pembagian kekayaan dalam suatu kelas sama-rata, tetapi tidak demikian antara satu kelas dengan kelas lainnya. (6) Kita teruskan saja apa yang sekarang berlangsung. (7) Sosialisme: bagian yang sama untuk setiap orang.

Sekarang terserah kepada kita, termasuk sistem pembagian rezeki yang mana di Indonesia sekarang, atau sistem mana yang hendak kita laksanakan dalam masa mendatang ini. Namun satu hal yang pasti, yaitu bahwa komitmen kita kepada keadilan sosial harus diikuti dengan kesungguhan memikirkan bagaimana melaksanakannya. [❖]